



IMPLEMENTASI SAKIP
(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
KABUPATEN SIDOARJO

clideo.com

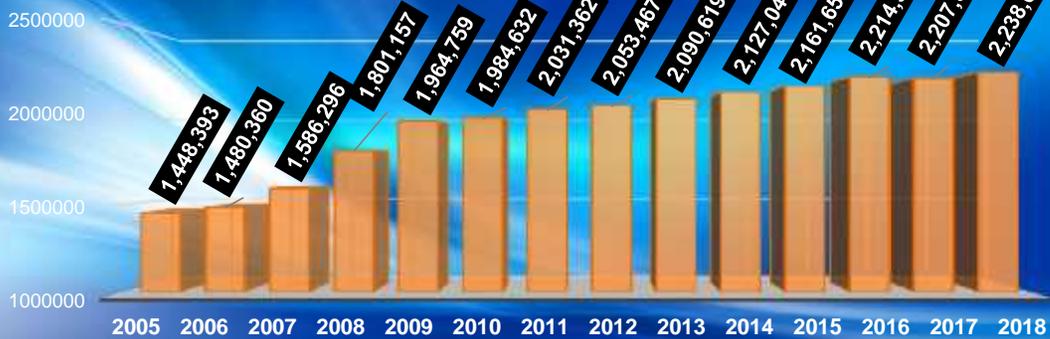


Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten dengan Luas Wilayah terkecil di Provinsi Jawa Timur, namun memiliki Kepadatan Penduduk yang tinggi Sektor Industri dan Perdagangan memiliki kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan ekonominya.

Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

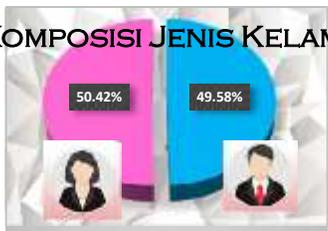


Perkembangan Jumlah Penduduk



Luas Wilayah : ± 74.000 Hektar

KOMPOSISI JENIS KELAMIN



KOMPOSISI PENGGUNAAN LAHAN



Akses Bandara Internasional Juanda

Berbatasan Langsung dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur

Sekitar 30% Penduduk Berprofesi Sebagai Wirausaha / Karyawan Swasta



Paling Banyak pada kelompok usia MILLENNIAL



Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo



SHARE PDRB ADHK TAHUN 2018



Usaha Mikro 207.184 Usaha Jumlah Industri 16.966 Industri

Ekonomi Kreatif 76 Komunitas



Daya Saing Ekspor - Import



Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo (dalam ratusan juta)



| Tahun | APBD |
|-------|-------------------------|
| 2010 | Rp 1.548.893.544.341,35 |
| 2011 | Rp 1.823.869.841.572,00 |
| 2012 | Rp 2.189.900.721.374,00 |
| 2013 | Rp 2.581.879.644.884,10 |
| 2014 | Rp 2.897.820.677.787,14 |
| 2015 | Rp 3.690.881.215.675,00 |
| 2016 | Rp 3.993.514.701.340,00 |
| 2017 | Rp 4.269.179.372.259,04 |
| 2018 | Rp 4.472.131.300.437,41 |
| 2019 | Rp 4.826.488.930.000,00 |

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah |
|-------|-------------------------|
| 2010 | Rp 356.161.848.548,24 |
| 2011 | Rp 484.313.737.307,27 |
| 2012 | Rp 669.617.556.904,41 |
| 2013 | Rp 858.433.670.217,95 |
| 2014 | Rp 1.115.332.938.500,16 |
| 2015 | Rp 1.266.786.627.409,24 |
| 2016 | Rp 1.335.283.958.792,70 |
| 2017 | Rp 1.671.806.819.696,53 |
| 2018 | Rp 1.685.558.666.147,01 |

Memiliki 72 Sentra Usaha Mikro yang tersebar di 18 Kecamatan

Pertumbuhan Industri 0.45% dan Perkembangan UMKM Sangat Pesat

Nilai Ekspor lebih tinggi (60,14%) dari pada Nilai Import (39,86%)



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Prioritas Isu Strategis Pembangunan Daerah



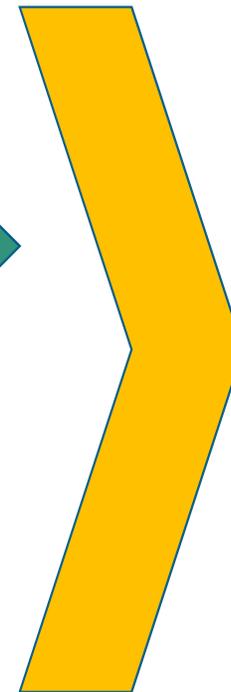
2 WAJIB
PENDIDIKAN
KESEHATAN



2 UNGGULAN
INDUSTRI
PERDAGANGAN
UMKM



6 PENUNJANG
INFRASTRUKTUR
LINGKUNGAN HIDUP
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PELAYANAN PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI



Sejahtera

Mandiri

Berkelanjutan



Inovatif





VISI KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

MISI 1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

MISI 2 PEREKONOMIAN

Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat

MISI 3 KUALITAS SDM

Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan

MISI 4 TATANAN SOSIAL

Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

MISI 5 INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Rekonstruksi Pencapaian Visi Misi



VISI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016- 2021

“KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN”

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
MELALUI OPTIMALISASI POTENSI BASIS
INDUSTRI PENGOLAHAN, PERTANIAN,
PERIKANAN, PARIWISATA, UMKM DAN
KOPERASI SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

MISI 2
(PEREKONOMIAN)

MENINGKATKAN KUALITAS DAN
STANDAR PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MISI 3 (KUALITAS SDM)

MENINGKATKAN TATANAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN
BERAKHLAQUL KARIMAH, BERLANDASAN
KEIMANAN KEPADA TUHAN YME, SERTA
DAPAT MEMELIHARA KERUKUNAN,
KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN

MISI 4
(TATANAN SOSIAL)

INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG
MEMADAI DAN BERKUALITAS SEBAGAI
PENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI
DENGAN MEMPERHATIKAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN.

**MISI 5 (INFRASTRUKTUR &
LINGKUNGAN)**

MISI 1 (TATA KELOLA PEMERINTAHAN)

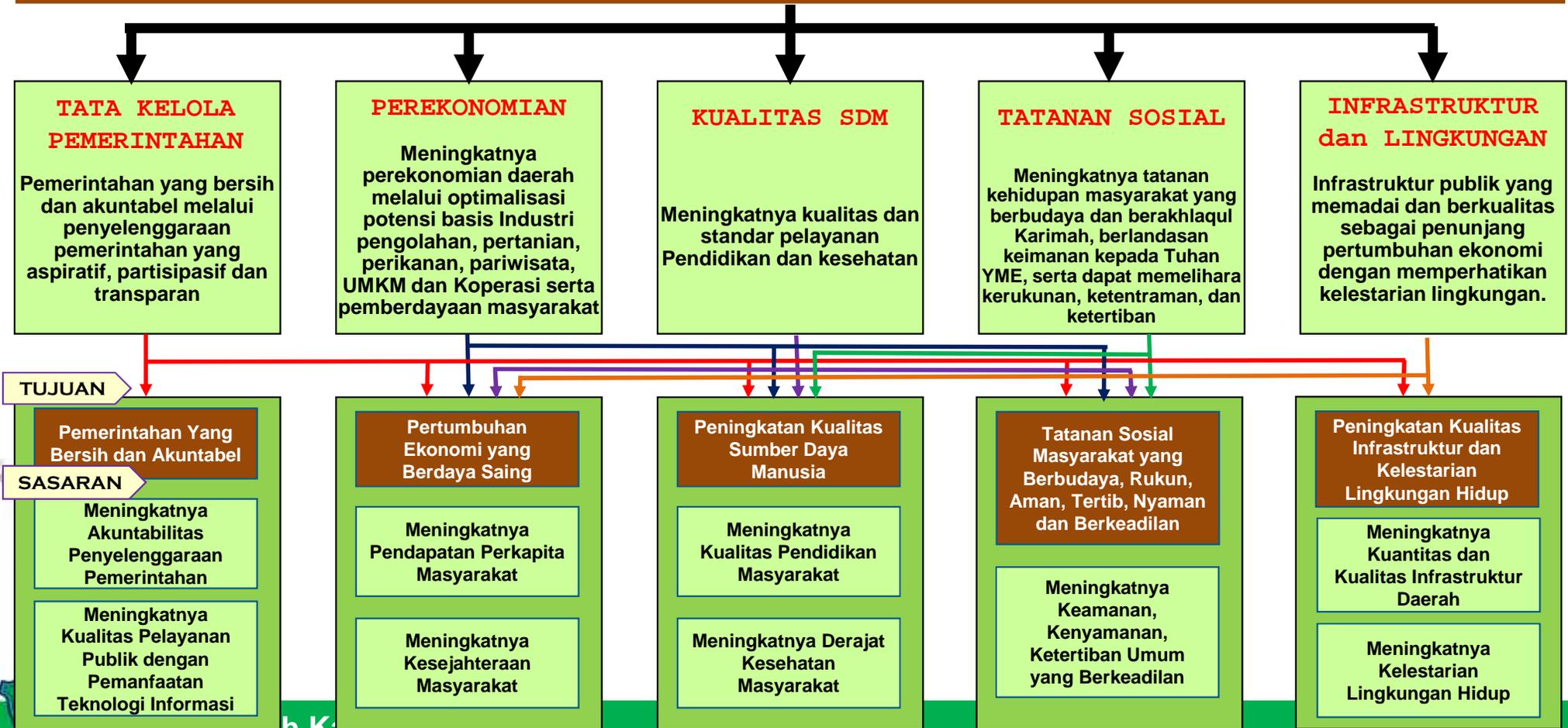
“PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MELALUI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF, ASPIRATIF, PARTISIPASIF DAN TRANSPARAN “


Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

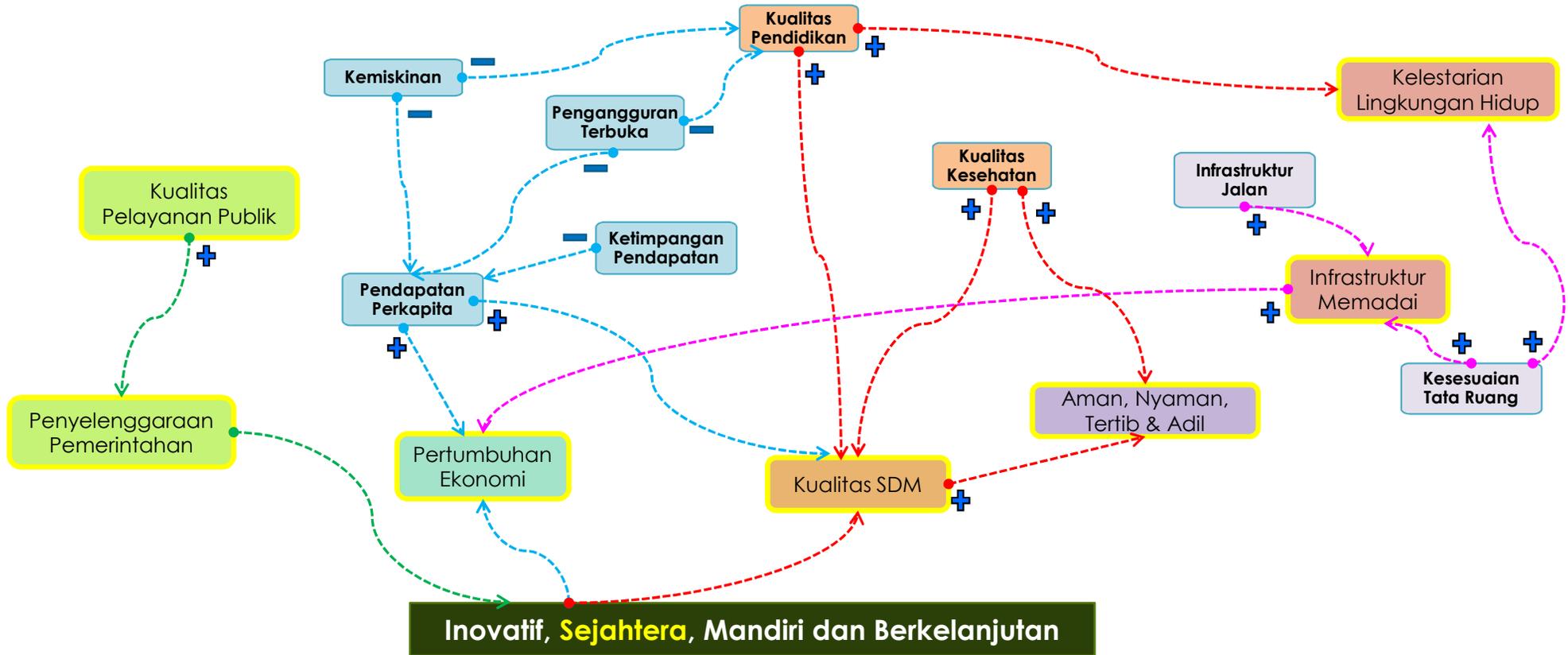
Rekonstruksi Pencapaian Visi Misi



KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN



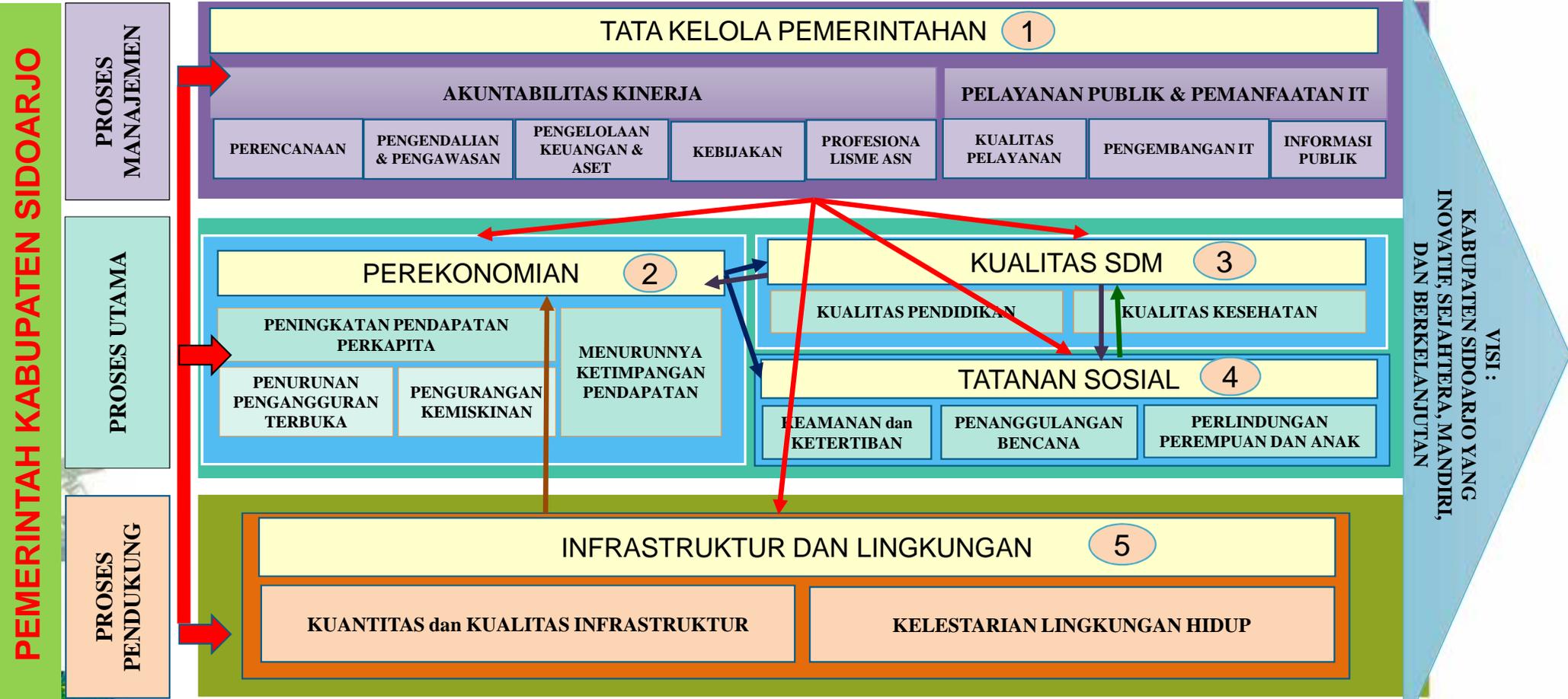
Kausalitas Loop Diagram Pencapaian Visi Misi



PROSES BISNIS Pecapaian Visi Misi

(Metode Level / Tingkatan Peta)

Level 0



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

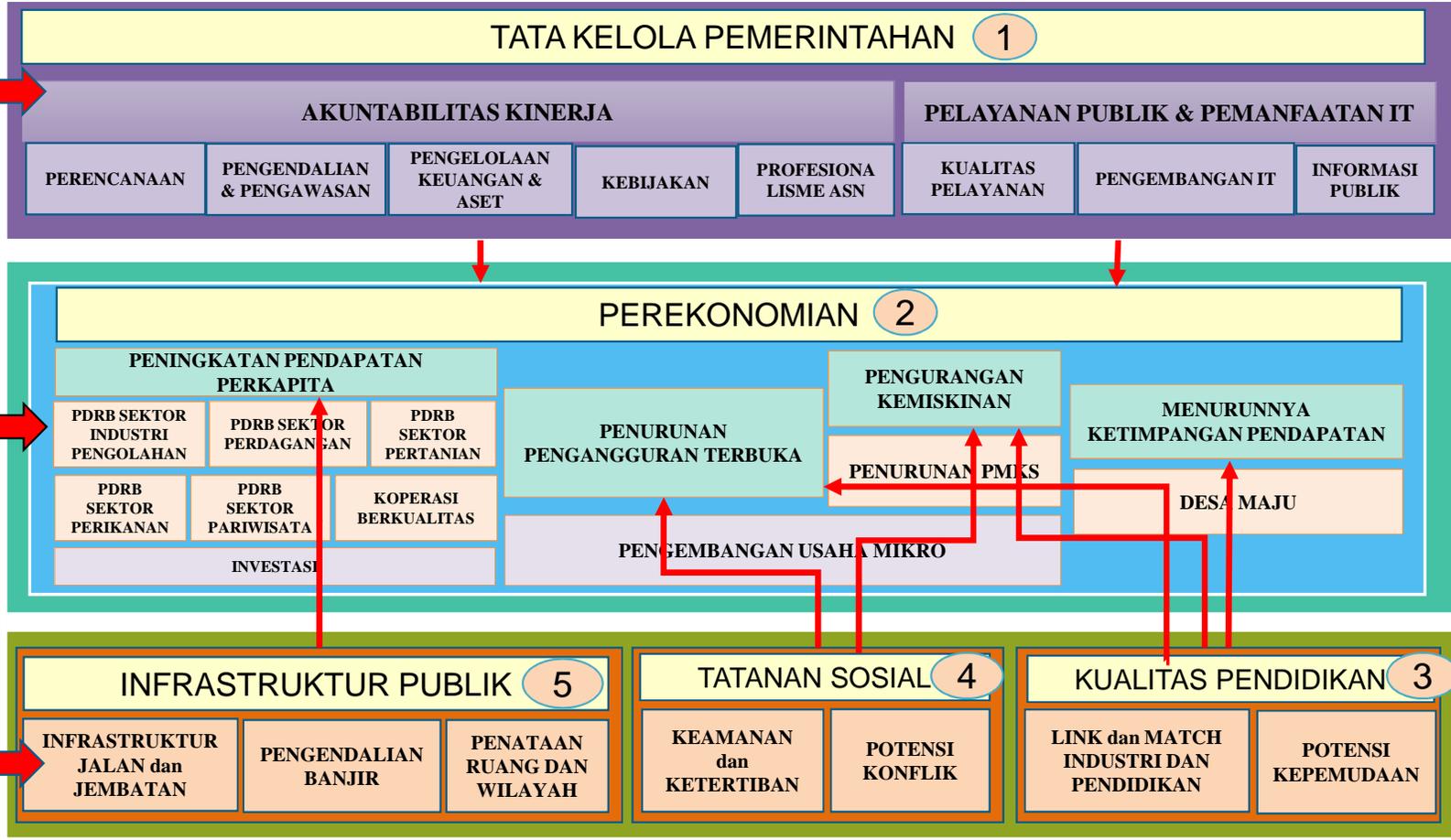
PROSES BISNIS (Contoh Pada Tujuan 2)

Level 1



PROSES 2 : PEREKONOMIAN

PROSES MANAJEMEN
PROSES UTAMA
PROSES PENDUKUNG



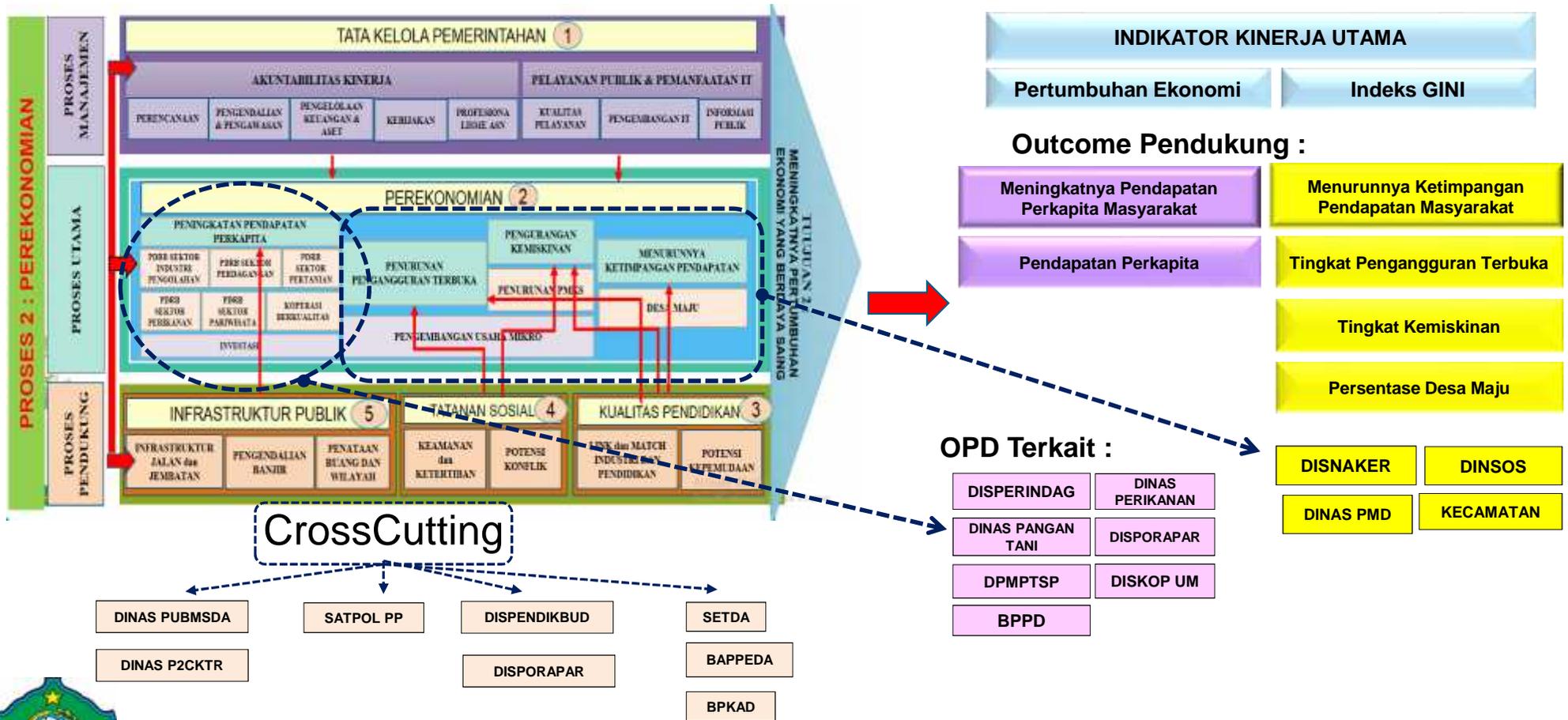
TUJUAN 2 :
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG BERDAYA SAING



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

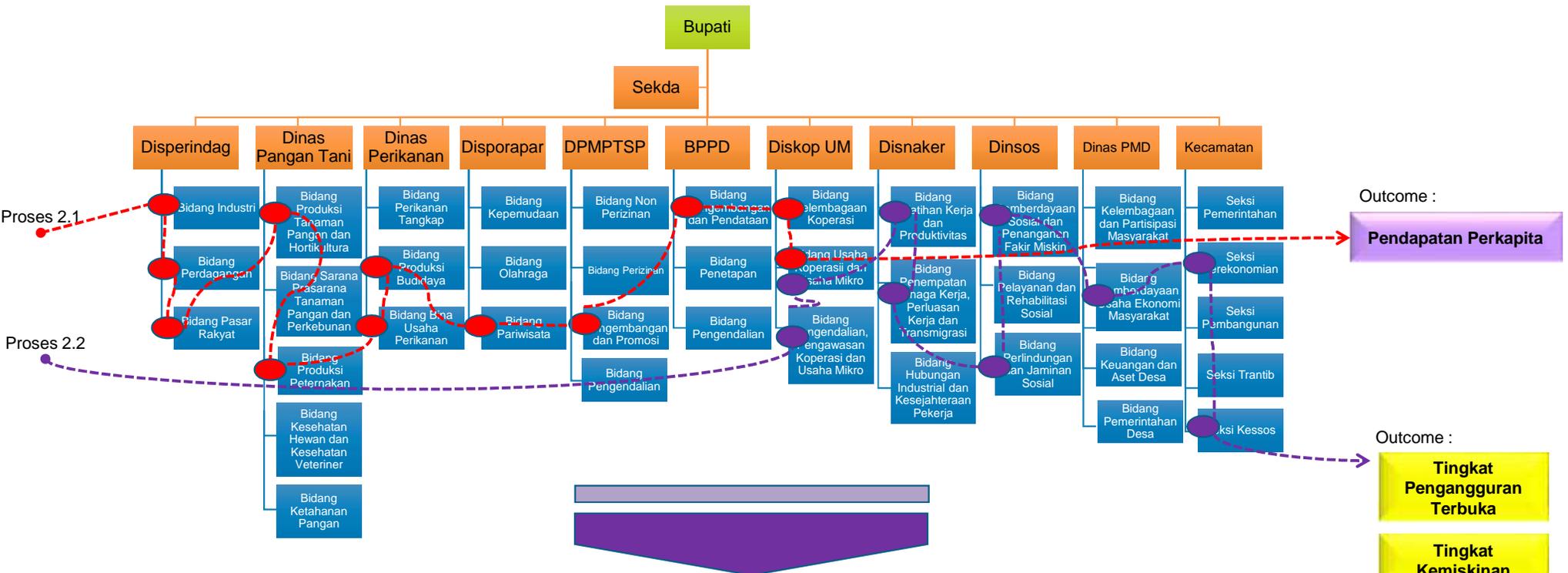
RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

TUJUAN 2



RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

TUJUAN 2



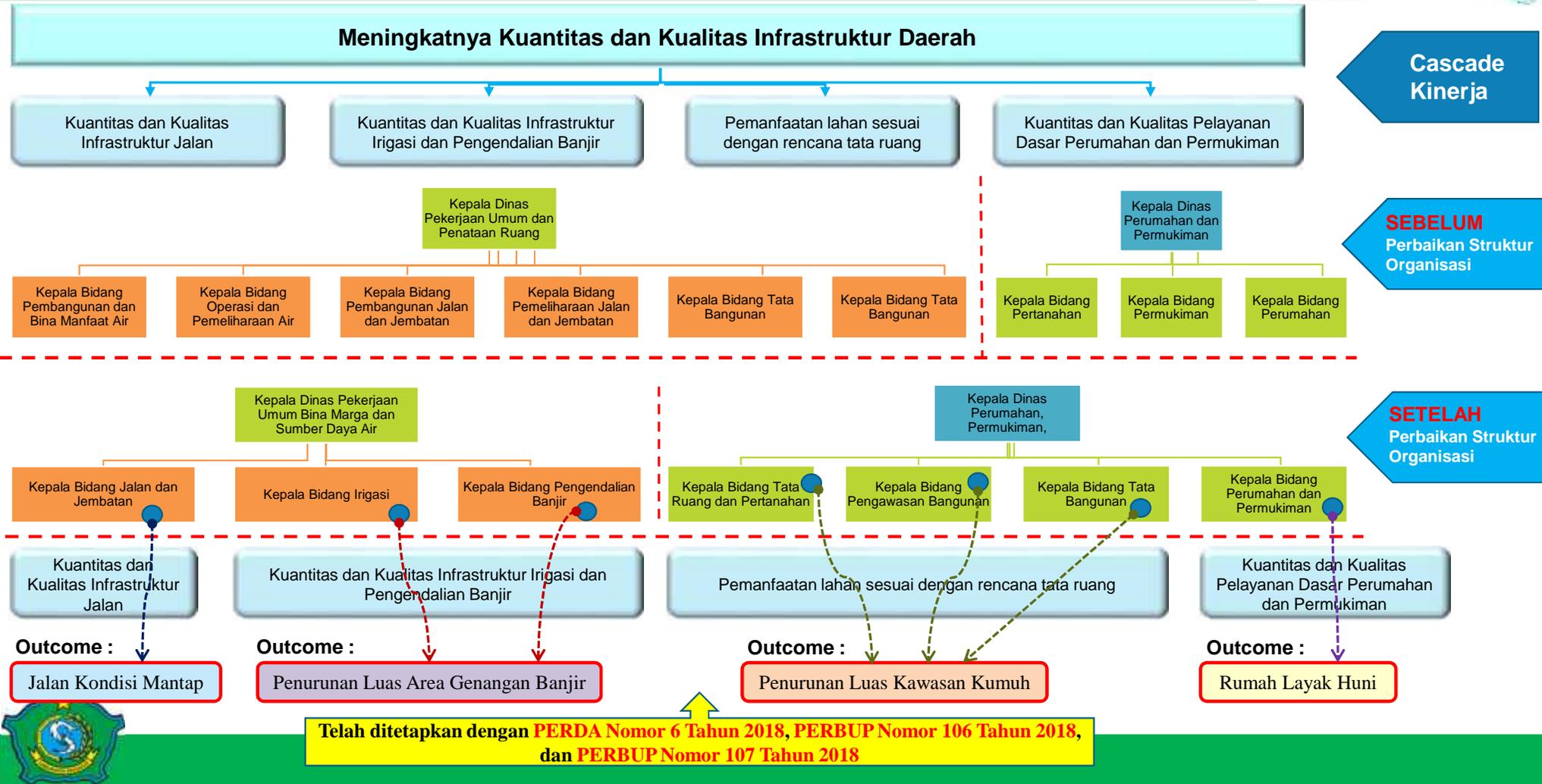
PENERAPAN *PERFORMANCE BASED ORGANIZATION* ATAU ORGANISASI BERBASIS KINERJA DENGAN MELAKUKAN PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI YANG DIDASARKAN PADA RPJMD



LOGICAL FRAMEWORK TUJUAN 2

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|--|---|
| Tujuan | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing | | | | | | | | | | | |
| Indikator Tujuan | Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | Indeks GINI | | | | | |
| Sasaran | Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat | | | | | | Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat | | | | | |
| Indikator Sasaran | Pendapatan Perkapita | | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka | Tingkat Kemiskinan | Persentase Desa Maju | | | |
| Sasaran OPD | Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan | Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan | Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perikanan | Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pertanian | Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata | Meningkatnya Investasi Daerah | Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka | Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
| OPD | DISPERINDAG | DINAS PERIKANAN | DINAS PANGAN TANI | DISPORAPAR | DPMPTSP | DISKOP UM | BPPD | DISNAKER | DINSOS | DINAS PMD | KECAMATAN | |
| PROGRAM UNGGULAN | Program Penuhungan dan Pengembangan IKM | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat | Program peningkatan produksi ikan dan pengawasan perikanan tangkap Program peningkatan produksi perikanan budidaya Program pengolahan, kesehatan ikan dan lingkungan | Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan / Kehewan dan Hasil Hewan Program Peningkatan produksi Hasil Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan pangan daerah | Program Pengembangan Objek, promosi, dan usaha pariwisata | Program peningkatan iklim dan realisasi investasi Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi | Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro | Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) lainnya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan keberdayaan usaha ekonomi masyarakat | Program koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan |
| Urusan | Urusan Perindustrian | Urusan Perdagangan | Urusan Kelautan & Perikanan | Urusan Pangan & Urusan Pertanian | Urusan Pariwisata | Urusan Penanaman Modal | Urusan Koperasi & Usaha Mikro | Unsur Penunjang | Urusan Tenaga Kerja | Urusan Sosial | Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa | Unsur Penunjang |

Penerapan *Performance Based Organization* Pada Perubahan Struktur Organisasi OPD (Contoh)



Kebijakan Re-Strukturisasi OPD



PERDA Nomor 6 Tahun 2018



RUPAT SIDAARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RUPAT SIDAARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, dan efisiensi kinerja pemerintah daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan ulang beberapa perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka kesesuaian struktur dengan beban kerja organisasi perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Rata-Rata Wilayah Kabupaten Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

PERBUP Nomor 106 Tahun 2018



RUPAT SIDAARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN UMUM DINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RUPAT SIDAARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Umum Dina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PERBUP Nomor 107 Tahun 2018



RUPAT SIDAARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

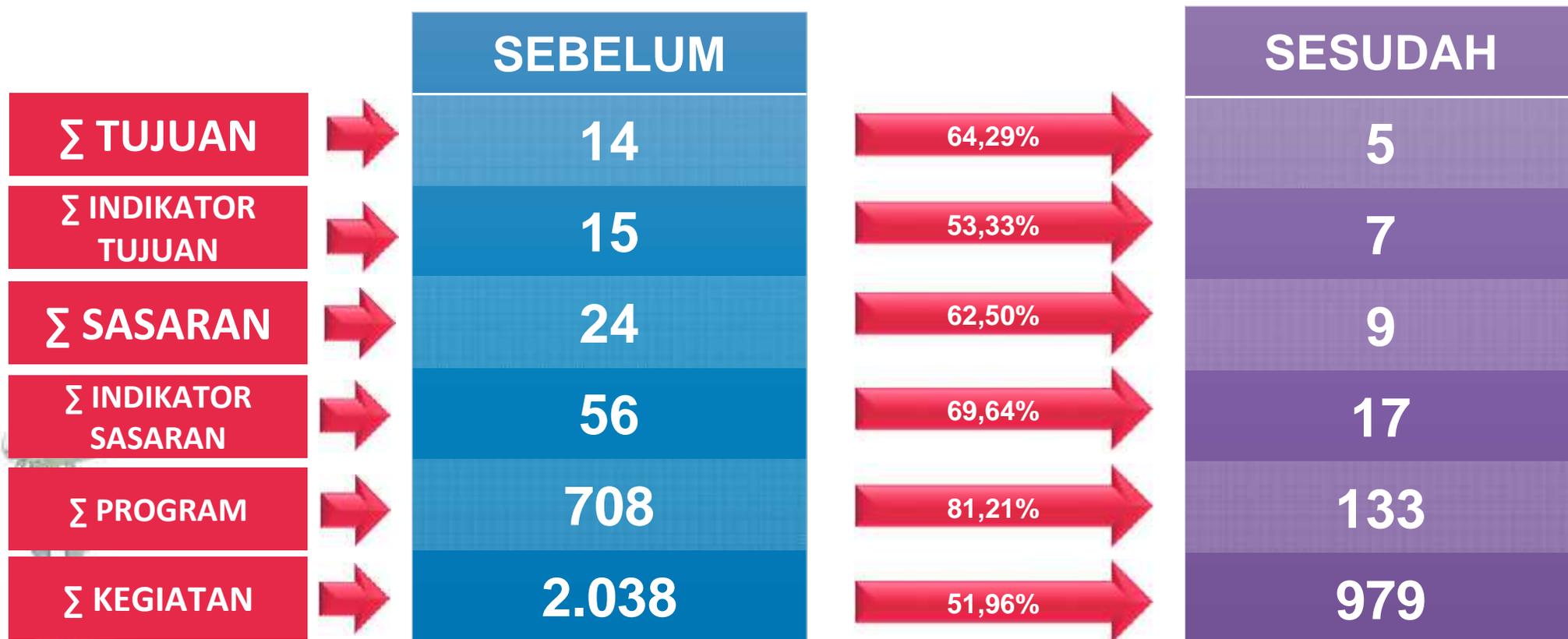
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);



REFOCUSSING RPJMD Kabupaten Sidoarjo



Re-Focussing RPJMD Tahun 2016 - 2021





EFEKTIFITAS & EFISIENSI DALAM PENGANGGARAN Melalui Penerapan *Performance Based Budgeting*



NILAI EFISIENSI

238 M

Kebijakan *Performance Based Budgeting* :



Memastikan kinerja apa yang akan dihasilkan terlebih dahulu, sebelum mengajukan anggaran (*Money Follow Result*)



Fokus pada Prioritas Tematik Pembangunan



Menyusun Analisa Standart Biaya (ASB) Kegiatan, yang selanjutnya akan disusun ASB Program



Menyusun Meta Program dan Meta Kegiatan (Kerangka Acuan Kinerja) dalam pengajuan anggaran



Efisiensi Belanja Operasional (ATK, Perjalanan Dinas, dll) pada satu Kegiatan



Re-Focussing Program dan Kegiatan

Re-Strukturisasi Organisasi



EFISIENSI

EFISIENSI
DIMANFAATKAN
UNTUK :



Penguatan Ekonomi Lokal



Peningkatan Infrastruktur Publik



Pemberian Reward Kinerja

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA

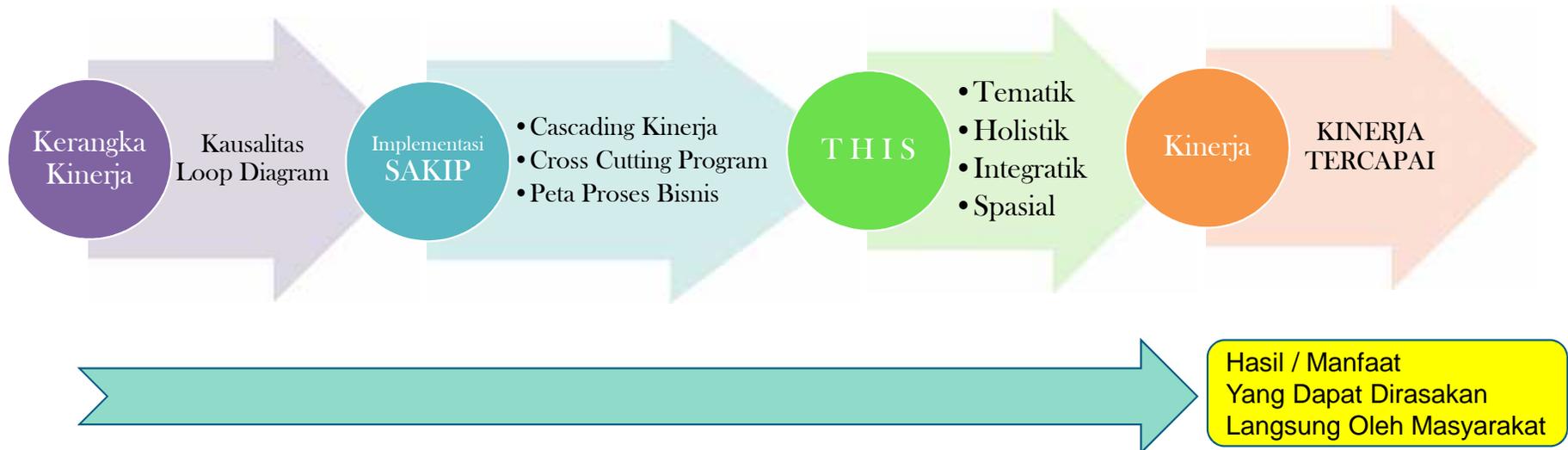




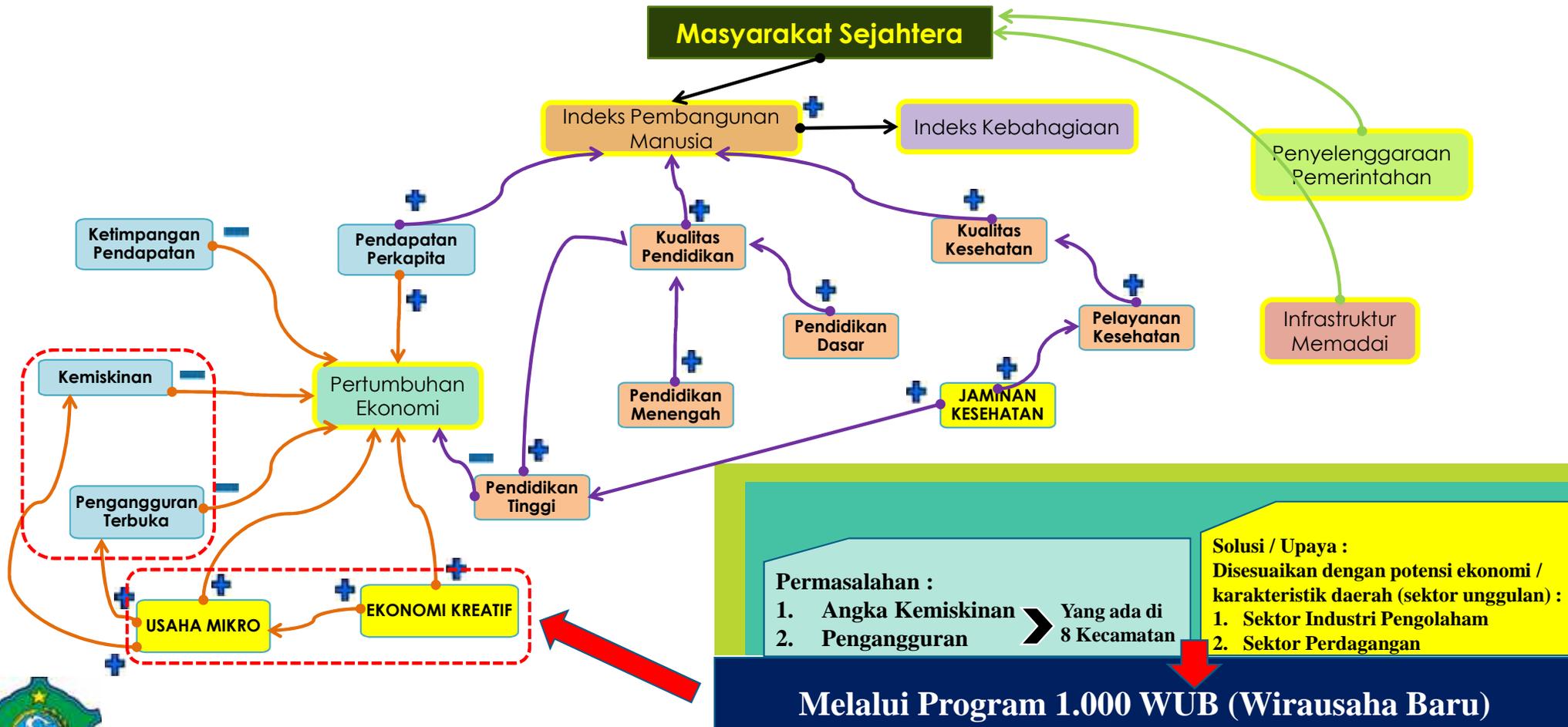
Implementasinya dan Hasilnya Bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo



Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

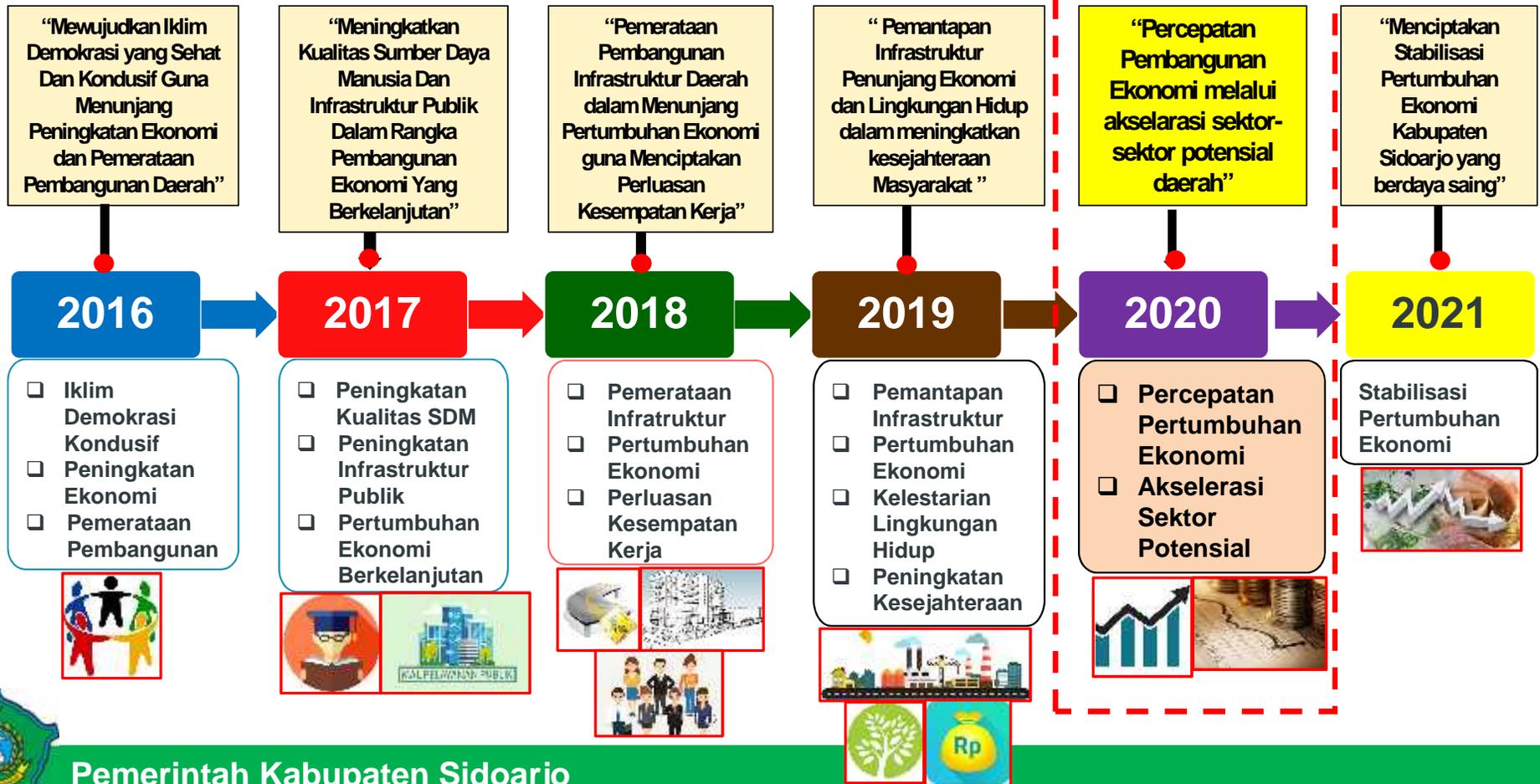


Implementasi Kausalitas Loop Diagram Dalam Mewujudkan Kesejahteraan



TEMATIK

ALUR TEMATIK PEMBANGUNAN RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021

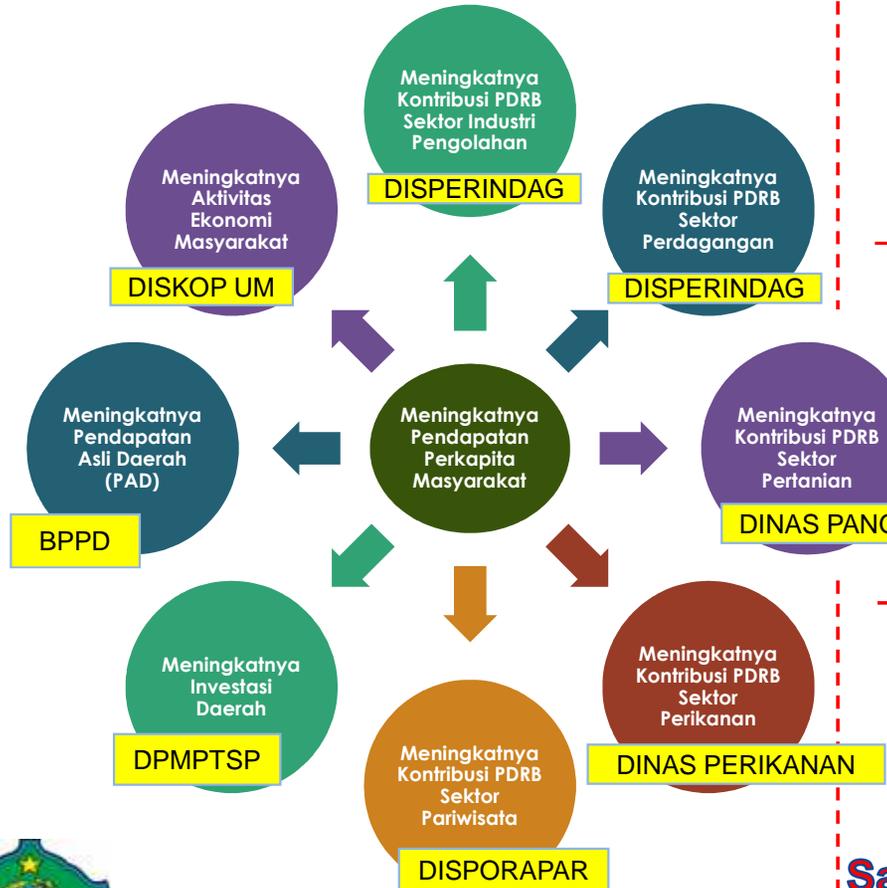


HOLISTIK

Cross Cutting Sasaran Lintas Sektor OPD



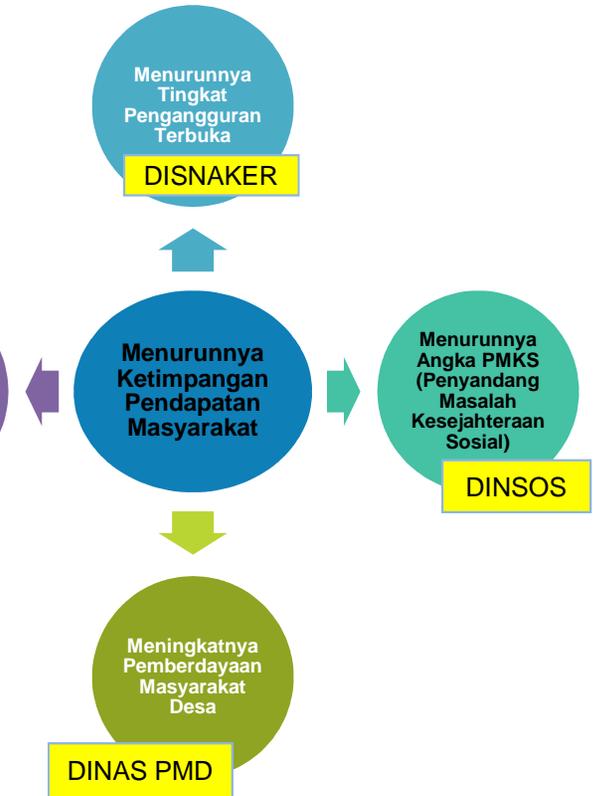
CrossCutting Sasaran 3



Sasaran 5



CrossCutting Sasaran 4



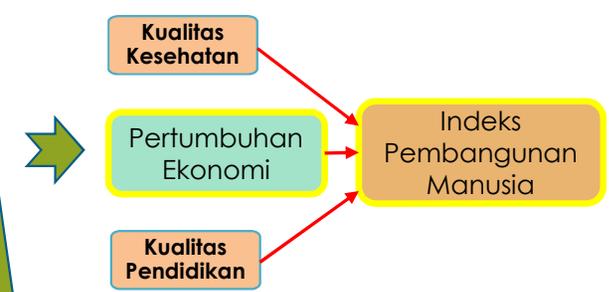
Sasaran 6



INTEGRATIK



Integrasi Program dan Kegiatan Lintas OPD



Strategi Percepatan Pencapaian Kinerja :

- Optimalisasi Penumbuhan Wira Usaha Baru melalui **PROGRAM 1.000 WUB**
- Efisiensi Kegiatan Pelatihan** menjadi terpusat di satu OPD, yaitu **DISKOP** dengan **NILAI EFISIENSI 11 Milyar**
- Menambahkan proporsi anggaran untuk **Pemberian JKM dan UHC** agar Masyarakat Fokus ke Pembiayaan Pendidikan Tinggi, dengan mengurangi beban biaya kesehatan



SPASIAL

Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kewilayahan



Peta Wilayah Rawan Kemiskinan



- ❑ Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Kewilayahan Berdasarkan Peta Sebaran Kemiskinan
- ❑ Ada 8 Kecamatan yang menjadi sasaran, yaitu Kecamatan : Jabon, Porong, Krembung, Prambon, Tulangan, Wonoayu, Tarik, dan Balongbendo
- ❑ Hasil Program 1.000 WUB dapat menjadi Produk Unggulan dan Potensi Kewilayahan



Outcome :

Indeks GINI



 Kecamatan Rawan Kemiskinan

PROGRAM 1.000 WUB



1000 Wirausaha Baru (1000WUB) adalah sebuah komitmen untuk menciptakan kekuatan ekonomi lokal yang berkelanjutan, melalui sebuah program pendampingan kewirausahaan untuk mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan wirausaha. Dengan 4 tahapan utama kegiatan pembinaan 1000 Wirausaha Baru



TAHAP 1
DATA COLLECTION
MARET 2019



TAHAP 2
BOOTCAMP
MEI 2019



TAHAP 3
GRADUATION
AGUSTUS 2019



TAHAP 4
FUNDING
NOVEMBER 2019

Kegiatan ini ditargetkan ke warga kurang mampu di kecamatan terluar kabupaten Sidoarjo, dengan rincian **75 persen** warga kurang mampu dan **25 persen** pelaku usaha **UMKM / UKM / IKM / Startup**

1000

Peserta



8

Kecamatan



PROGRAM 1.000 WUB

Success Story :



Siti Maulastiyani

Produk: **KOBONG**
 Kategori: **Makanan**
 Deskripsi: **KOBONG** adalah produk olahan dari tepung terigu yang digoreng dengan bumbu kacang dan taburan bawang putih.

Lusi Kheilir R

Produk: **Si Putih**
 Kategori: **Minuman**
 Deskripsi: **Si Putih** adalah minuman kekinian yang terbuat dari susu, keju, dan buah-buahan. Tidak hanya enak, tetapi juga kaya akan nutrisi.

Nuris Aningsaseni

Produk: **Walaupun Boleh Tere**
 Kategori: **Kulit**
 Deskripsi: **Walaupun Boleh Tere** adalah produk perawatan kulit yang terbuat dari bahan-bahan alami yang aman dan efektif.

Agus Satrio

Produk: **Si Putih**
 Kategori: **Minuman**
 Deskripsi: **Si Putih** adalah minuman kekinian yang terbuat dari susu, keju, dan buah-buahan. Tidak hanya enak, tetapi juga kaya akan nutrisi.

Nur Ghafar Fauziah

Produk: **TUMPA**
 Kategori: **Makanan**
 Deskripsi: **TUMPA** adalah produk olahan dari tepung terigu yang digoreng dengan bumbu kacang dan taburan bawang putih.

Siti Khoirah

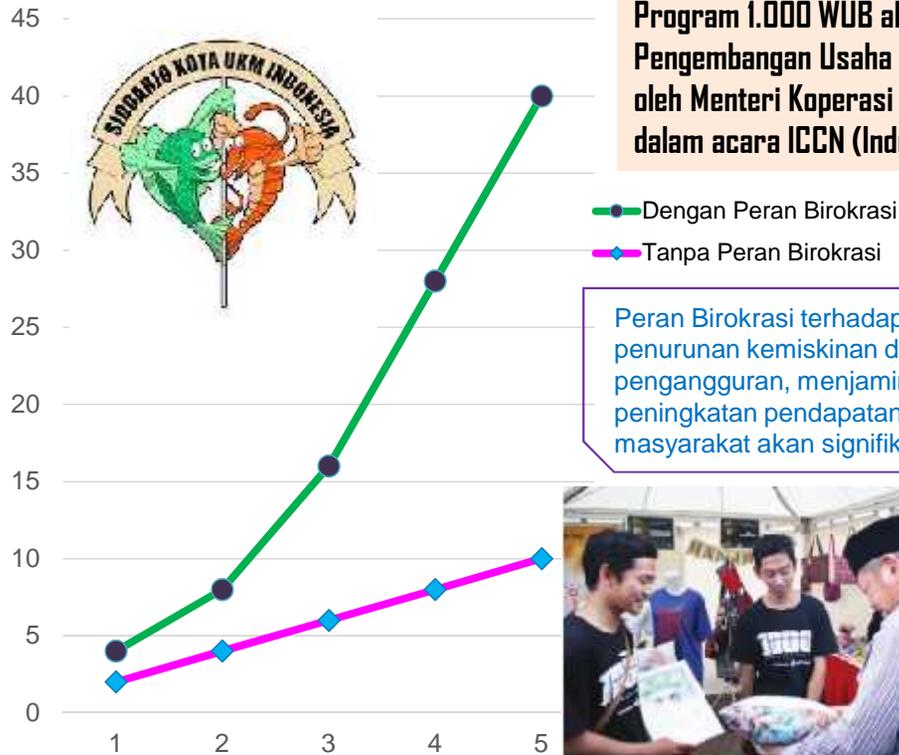
Produk: **Capcin Taki**
 Kategori: **Minuman**
 Deskripsi: **Capcin Taki** adalah minuman kekinian yang terbuat dari susu, keju, dan buah-buahan. Tidak hanya enak, tetapi juga kaya akan nutrisi.

Program 1.000 WUB merupakan implementasi percepatan pencapaian kinerja dalam **Penurunan Pengangguran** dan **Kemiskinan** berbasis Akuntabilitas Kinerja Untuk selanjutnya di Tahun 2020 akan dikembangkan menjadi Program 10.000 WUB dan sinergi dengan Era Industri 4.0

PROGRAM 1.000 WUB



Harapan Peran Birokrasi Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat



Program 1.000 WUB akan dijadikan sebagai Role Model Pengembangan Usaha Mikro oleh Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Dr. TETEN MASDUKI dalam acara ICCN (Indonesia Creative Cities Network)

Peran Birokrasi terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran, menjamin peningkatan pendapatan masyarakat akan signifikan



HASIL CAPAIAN KINERJA



Sumber Data : BPS Kab. Sidoarjo

| Baseline Tahun 2015 | Kab. Sidoarjo Tahun 2019 | Prov. JATIM Tahun 2019 | NASIONAL Tahun 2019 |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|

Peningkatan Kualitas SDM

| INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| 77.43 | 79.50 | 70.77 | 71.39 |

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

| PERTUMBUHAN EKONOMI | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 5.24% | 6.05% | 5.50% | 5.17% |

Pemerataan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah

| INDEKS GINI | | | |
|-------------|------|------|------|
| 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

| TINGKAT KEMISKINAN | | | |
|--------------------|-------|--------|-------|
| 6.44% | 5.69% | 10.85% | 9.66% |

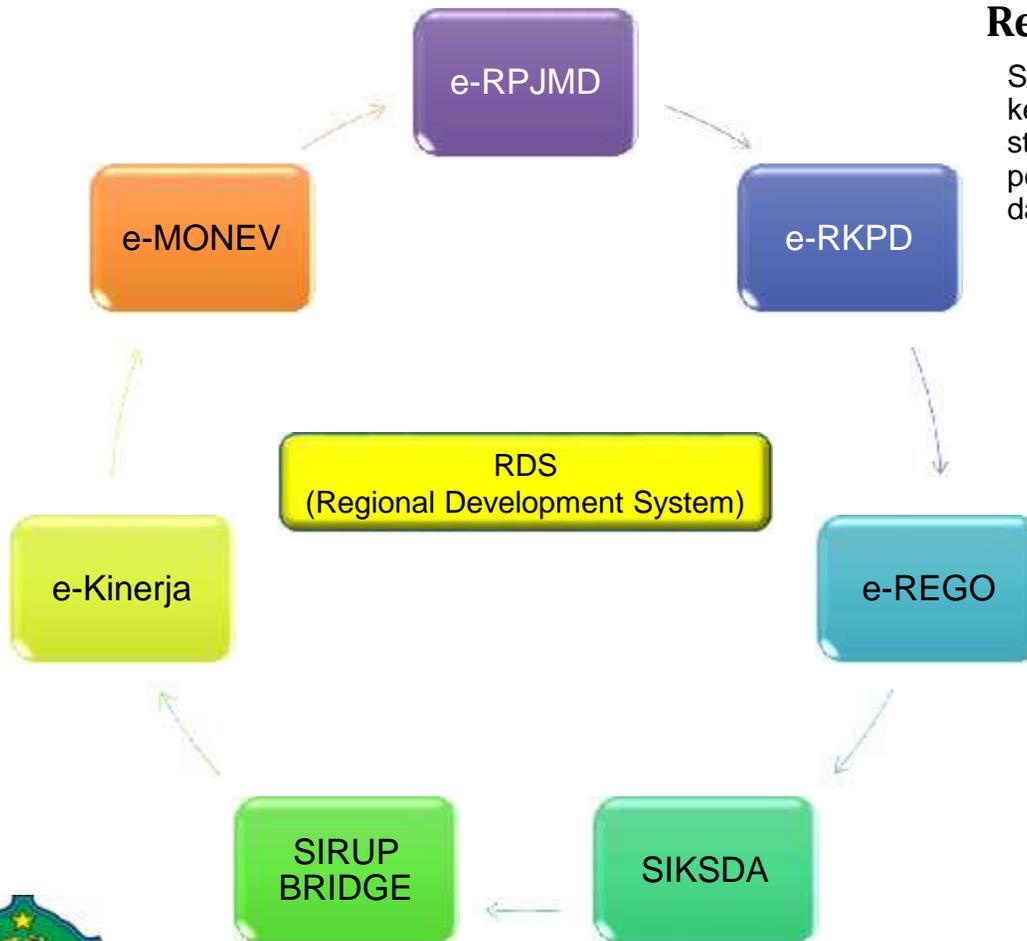
Penurunan Angka Pengangguran

| TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| 6.30% | 4.73% | 3.99% | 5.34% |



IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA





Regional Development System (RDS)

Sistem Manajemen Kinerja Daerah yang dilaksanakan melalui keterpaduan dan konsistensi langkah mulai perencanaan -> standarisasi harga barang / jasa -> penganggaran -> proses pengadaan barang / jasa -> pengukuran kinerja -> monitoring dan evaluasi kinerja

5 KEUNGGULAN RDS

- **KONSISTENSI**, Kesinambungan visi-misi sampai dengan target indikator bisa dipertahankan karena bisa dilakukan penguncian melalui sistem.
- **TRANSPARANSI**, Kecamatan dan anggota DPRD dapat memantau perjalanan usulan *bottom up* melalui sistem.
- **KESERAGAMAN**, Penggunaan erogo yang berisi standar belanja, standar biaya, dan ASB menjamin keseragaman nama barang, kode rekening, dan harga, disamping juga memenuhi amanah Permendagri no 13 tahun 2006 pasal 93 (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, SSH, dan SPM.
- **EFEKTIF**, Dengan RDS kebijakan penganggaran yang dikeluarkan oleh TAPD bisa diterapkan secara efektif, karena perubahan-perubahan yang mendasar bisa dilakukan melalui sistem
- **EFISIEN**, Pelaksanaan verifikasi yang semula membutuhkan banyak kertas, karena manual, dapat dilakukan secara *paperless* sehingga menghemat penggunaan kertas. Selain itu, satu kali input oleh PD juga menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan perencanaan.





Regional Development System

APLIKASI PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

SELANJUTNYA

INDIKATOR KEGIATAN

**KEGIATAN
PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARPARSA KEINDAHAN KOTA**

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

| INDIKATOR KEGIATAN | DESKRIPSI | KONDISI AWAL | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | |
|--|---|--------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | TARGET 2016 | PAGU 2016 | TARGET 2017 | PAGU 2017 | TARGET 2018 | PAGU 2018 | TARGET 2019 | PAGU 2019 | TARGET 2020 | PAGU 2020 | TARGET 2021 | PAGU 2021 |
| | | | 1. Jumlah sarpras keindahan kota yang diciptakan | jumlah sarpras keindahan kota yang diciptakan | - jenis | 13 jenis | Rp. 350.700.000 | 13 jenis | Rp. 1.342.750.000 | 16 jenis | Rp. 1.710.500.000 | 15 jenis | Rp. 2.052.500.000 | 16 jenis |
| 2. Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara | jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara | jenis | 3 jenis | | 13 jenis | | 3 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | 3 jenis | |

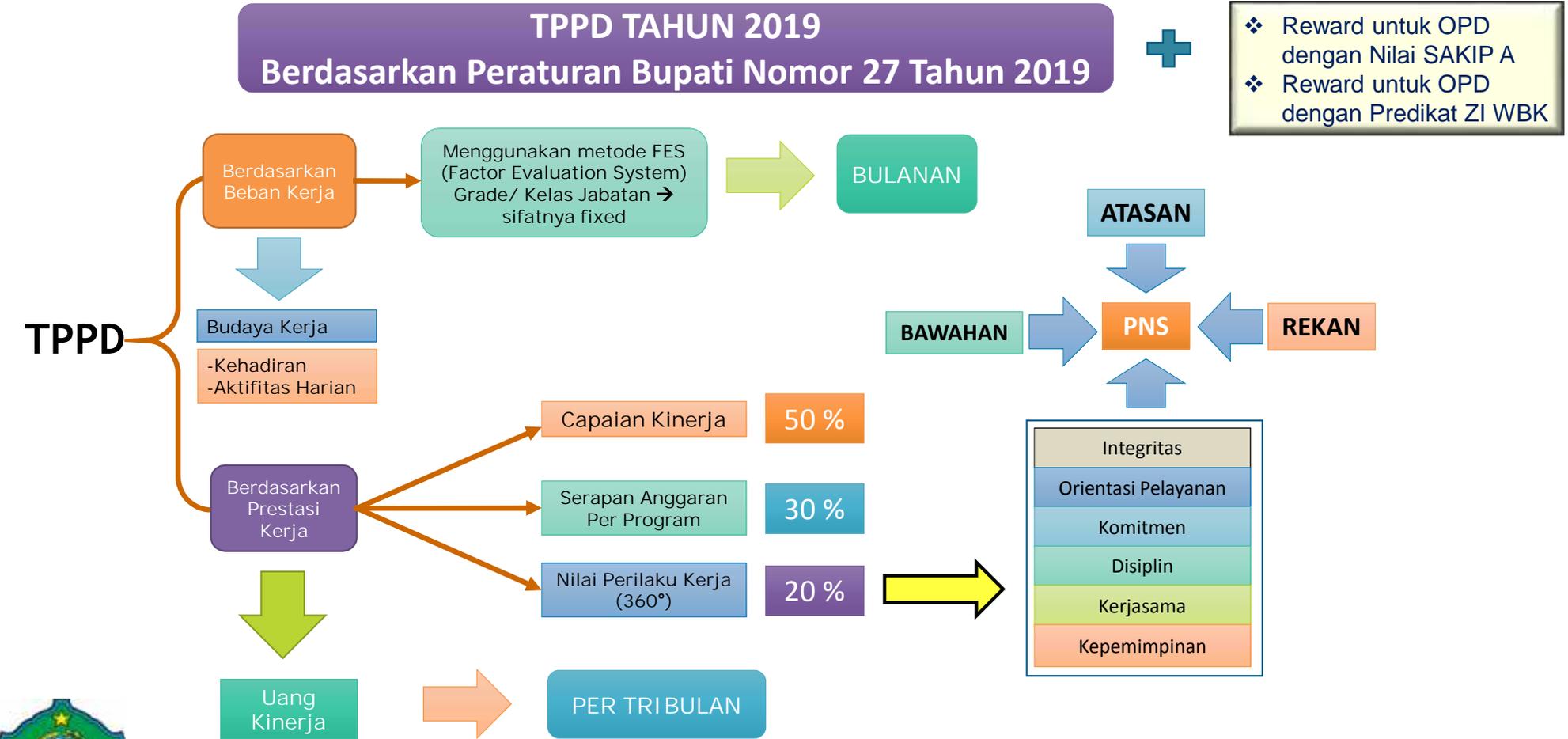
Tutup

BERIKUTNYA

- KEGIATAN : Pembangunan/rehabilitasi ...
ANGGARAN : Rp. 14.847.562.000
- KEGIATAN : Penyelenggaraan pemeliharaan ...
ANGGARAN : Rp. 91.181.931.900
- KEGIATAN : Penyediaan dan pemeliharaan sarpras keindahan kota
ANGGARAN : Rp. 10.825.814.000
- KEGIATAN : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keindahan lingkungan
ANGGARAN : Rp. 257.009.000
- KEGIATAN : Peningkatan pemertanian jalat umum
ANGGARAN : Rp. 30.680.150.000
- KEGIATAN : Pemeliharaan pemertanian jalat umum
ANGGARAN : Rp. 103.914.358.400
- KEGIATAN : Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri (DEHLHI)
ANGGARAN : Rp. 0
- PROGRAM : Program Perencanaan Kinerja Pengelolaan Lingkungan
ANGGARAN : Rp. 557.056.300.050
- PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
ANGGARAN : Rp. 1.570.000.000



Mekanisme Pemberian *Reward* dan *Punishment*





E-PERKIN

Admin Developer

- Home
- Master
- Mading jabatan
- Mading IAU / IIM
- Sasaran Strategis
- Sasaran Antara
- Sasaran Program
- Sasaran Kegiatan
- Aktivitas Staff
- Verifikasi PK
- Verifikasi PK Pimpinan
- Laporan

Pcrangkat Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Program Program Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Alasan AGOES HENDRAJANTO, S.K.m

Staff PAT MAWATI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN / BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP / SEKSI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

| | |
|----------------|--|
| Nama Pegawai | PAT MAWATI |
| Jabatan | PENGADMINISTRASI UMUM |
| Nama Atasan | AGOES HENDRAJANTO, S.K.m |
| Jabatan Atasan | KEPALA SEKSI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP |



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI UMUM**

| NO. | URAIAN AKTIVITAS | FORMULASI/PENJELASAN | TARGET | # |
|-----|---|----------------------|------------|-------------------------------------|
| 1. | Menerima dan mengagenda surat masuk | | 12 Laporan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. | Mengagenda dan mengajukan surat keluar | | 12 Laporan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | Mengetik surat tugas dan sppd | | 12 Laporan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. | Mencatat kegiatan pimpinan ke papan tulis berdasarkan agenda kegiatan | | 12 Laporan | <input checked="" type="checkbox"/> |

Komitmen Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2018



REKOMENDASI TAHUN 2018

Menerapkan *Performance Based Organization* dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam membangun organisasi selain memperhatikan ketentuan tentang penyusunan organisasi perangkat daerah

Menyusun suatu peta proses bisnis yang menggambarkan proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi. Peta proses bisnis ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam perumusan cascade kinerja utama pada setiap jenjang organisasi hingga individu

Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mewajibkan setiap penanggung jawab program melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan lintas Perangkat Daerah

Lebih mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP. Penguatan budaya kinerja ini juga sebaiknya dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja

TINDAK LANJUT TAHUN 2019



• MENERAPKAN PERFORMANCE BASED ORGANIZATION ATAU ORGANISASI BERBASIS KINERJA DENGAN MELAKUKAN PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI YANG DIDASARKAN PADA RPJMD



• MENYEMPURNAKAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS UNTUK MENJADI DASAR PERBAIKAN CASCADING KINERJA OPD HINGGA INDIVIDU



• MENYEMPURNAKAN EVALUASI KINERJA DENGAN MELAKUKAN MONEV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, SELAIN MONEV PROGRAM, KEGIATAN, DAN REALISASI ANGGARAN



• MENYUSUN ANALISA RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA DAERAH

• KESELARASAN ANTARA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DENGAN SKP

• MENYEMPURNAKAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU MELALUI INTEGRASI SISTEM SKP ONLINE, PERJANJIAN KINERJA ONLINE, DAN E-MONEV MENJADI E-KINERJA, SEBAGAI DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA





SAKIP
2018

SAKIP AWARD 2018

MAKING CHANGE. MAKING HISTORY

MAKING CHANGE
MAKING HISTORY



IMPLEMENTASI
**REFORMASI
BIROKRASI**

KABUPATEN SIDOARJO
2019

portalsidoarjakab.go.id

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

PEMKAB SIDOARJO



**BIROKRASI YANG BERSIH
DAN AKUNTABEL**

01

**BIROKRASI YANG EFEKTIF
DAN EFISIEN**

02

**BIROKRASI DENGAN
PELAYANAN PUBLIK LEBIHBAIK**

03

8 AREA PERUBAHAN

PELAYANAN

Mendorong Peningkatan kualitas Pelayanan yang lebih cepat, mudah, nyaman, terjangkau

08

MENTAL/ PERILAKU APARATUR

Aparatur dengan integritas dan kinerja yang tinggi

01

PERATURAN

Produk hukum yang tidak tumpang tindih, harmonis, efektif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat

07

PENGAWASAN

Meningkatnya Birokrasi Bersih dan Bebas KKN

02

MANAJEMEN ASN

Meningkatkan system MSDM yang menghasilkan pegawai professional dan sejahtera

06

AKUNTABILITAS

Meningkatnya Kinerja dan tanggung jawab Birokrasi

03

TATA LAKSANA

Sistem, proses, dan prosedur kerja yang efektif dan efisien dalam pelayanan publik

05

KELEMBAGAAN

Organisasi yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

04

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PERENCANAAN

PELAKSANAAN
PROSES RB

MONITORING
DAN
EVALUASI

PENILAIAN
PMPRB ONLINE

INDEKS RB

1. ROAD MAP RB
2. RENJA RB

MONEV INTERNAL
TRIBUNAL & TAHUNAN

2016
48,82

2017
62,93

2018
65,58

HASIL IMPLEMENTASI RB PENGAWASAN

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBKMM)
Jakarta, 10 December 2019



01

WAJAR TANPA
PENGECUALIAN (WTP) 6 KALI

3 OPD PREDIKAT WBK (2019)
RSUD, KEC.SUKODONO, DPMPSTP

02

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) LEVEL 3 DARI BPKP
PUSAT 2018

03



HASIL IMPLEMENTASI RB

AKUNTABILITAS



**LPPD PERINGKAT 1
NASIONAL (2017 – 2019)
KATEGORI KABUPATEN**



**SAMKARYA PARASAMYA
PURNA KARYA NUGRAHA
(2017)**



**SAKIP KATEGORI A
(2018)**

HASIL IMPLEMENTASI RB

MANAJEMEN ASN

**TOP 99 SIPEKAT
MENPAN RB 2017**



**BKN AWARD
REG. II 2017**



**DIKLAT AWARD
PROV. JATIM**



**JPT INSPIRATIF
MENPAN RB 2018**



HASIL IMPLEMENTASI RB

KELEMBAGAAN

PEMBENTUKAN UPTD PUSAT PERLINDUNGAN ANAK
OLEH MENTERI PPPA TAHUN 2019

PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN SAMPAH DAN
KETERTIBAN UMUM ANTARA DINAS TEKNIS DAN
KECAMATAN

PENERAPAN OSS PADA DPMPTSP

PROGRES JABATAN STRUKTURAL

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|
| 999 | 965 | 965 | 888 |



999 - 888

111

HASIL IMPLEMENTASI RB

TATA LAKSANA

TERBAIK 2
TINGKAT PROVINSI
"INOVASI SIAP TARIK"
PADA PUSKESMAS TARIK

01



03



PERINGKAT 7
Innovative Government Award
2018

TANDA TANGAN
DAN STEPEL ELEKTRONIK
PADA BKD, DPMPSTP,
KEC. SUKODONO

05



PIAGAM PENGHARGAAN

02



TOP 33
"PELAYANAN PAKET
PERIJINAN ONLINE"
PADA DPMPSTP

04



1 DARI 25 KAB/KOTA
"PROGRAM SMART CITY"
2017 - 2019

06



TOP 99
"SiMaNiEs"
RSUD

HASIL IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

01

MAL PELAYANAN PUBLIK
DENGAN **168** IJIN DAN
DIDUKUNG **30** INSTANSI

INDEKS SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 78,96 | 79,89 | 84,86 | 86,58 |
| BAIK | BAIK | BAIK | BAIK |

02

03

INDEKS PELAYANAN PUBLIK

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|
| BAIK | BAIK | BAIK | BAIK |

INDEKS PELAYANAN PUBLIK 2019

| RSUD | DPMPSTP | CAPIL |
|------|---------|-------|
| A | A- | B |

M P P KECAMATAN SUKODONO



INSTANSI: 9
BOOTH: 14
LAYANAN: 59
DIRESMIKAN
JANUARI 2020



TERIMAKASIH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO